

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia di tuntut untuk siap dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan mampu bersaing dengan negara lain. Perekonomian yang kuat menjadi salah satu kunci untuk mampu dalam bersaing. Pemerintah yang memiliki kesiapan yang kuat dan stabil dalam perekonomian adalah pemerintah yang mampu menghadapi globalisasi. Dengan perekonomian yang meningkat dari tahun ke tahun adalah ciri ciri dari perekonomian yang bagus atau baik. Hal ini karena pengembangan ekonomi wilayah serta pembangunan ekonomi nasional sama-sama bersangkutan satu sama lain (Soebagiyo, 2015). Penurunan yang terjadi pada suatu daerah itu dapat diperhatikan dari kegiatan ekonominya dan begitu pula terhadap peningkatan yang terjadi pada suatu daerah itu juga di perhatikan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh daerahnya.

Sumber daya alam daerah yang dipunyai harus dimanfaatkan dan diolah sedemikian baik untuk membentuk kerjasama antar pemerintah daerah dan sektor swasta dengan timbulnya kesempatan kerja bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi mengalami kelanjutan atau kemajuan, hal ini di perlukan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola jika sudah tercapai tujuannya dapat di katakan bahwa wilayah tersebut terjadi pembangunan ekonomi daerah (Siwu, 2019). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah diberikan kebebasan dalam merencanakan dan mengelolah wilayah yang dipimpinnya. Kebebasan tersebut dengan mengatur keuangan daerah sendiri, merencanakan program kerja

sesuai kebutuhan wilayahnya, serta mengurus masyarakat secara mandiri. Memudahkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan atau peraturan daerahnya sendiri.

Peningkatan daerah menjadi salah satu tujuan dari hasil pengelolaan potensi sektor ekonomi daerah yang baik dilihat dari kontribusi yang diperoleh setiap sektor. Semua jika dilakukan secara maksimal maka tercipta pembangunan ekonomi daerah. Ini dapat diketahui dari data potensi yang dipunyai suatu daerah yang diperoleh untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut. Membantu pemerintah agar mudah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dan program yang akan (Ayu Monica et al., 2017). Nilai strategis masing-masing sektor untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah itu memiliki berbagai macam perbedaan. Sektor basis yang dimiliki oleh daerah tersebut menjadi sektor potensial yang dapat digunakan dalam proses pengembangan ekonomi daerah.

Sektor ekonomi pada daerah dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sektor basis, di mana keuntungan maupun kerugian dari pemenuhan kebutuhan tersebut mengarah pada prosedur dari ekspor dan impor dari daerah satu ke daerah lainnya. Artinya industri sektor basis ini akan memiliki hasil yaitu barang dan jasa yang cukup baik untuk pasar domestik di daerahnya maupun pasar di luar wilayahnya. Sementara itu, sektor non basis telah menjadi sektor yang memiliki aktivitas ekonomi hanya mampu melayani pasar di daerahnya sendiri, dan belum mampu berkembang untuk ekspor ke luar daerah.

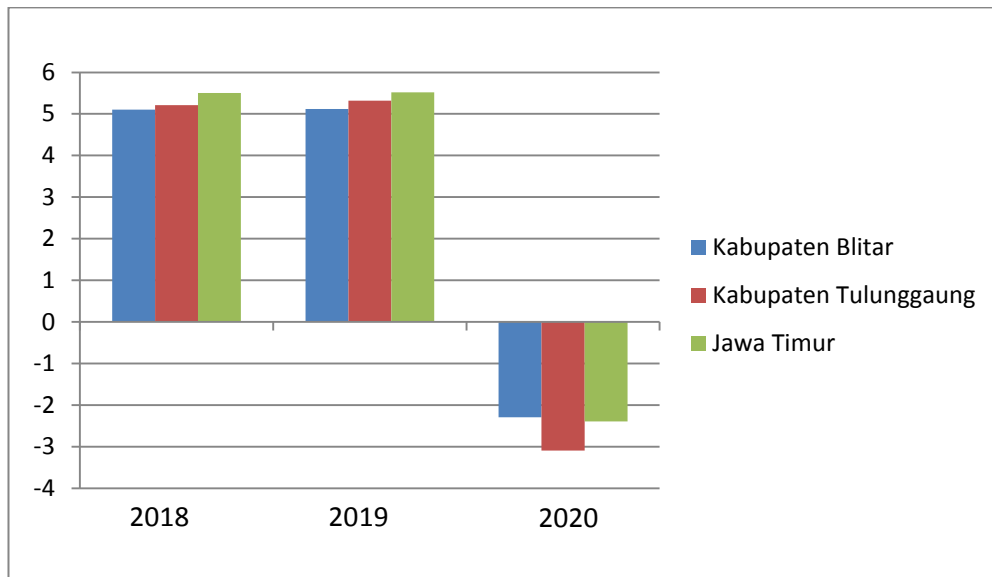
Perubahan struktur perekonomian adalah hal yang mampu dilihat bahwa suatu daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong sektor ekonomi tertentu melalui kontribusi pada PDRB daerah. PDRB juga mampu menyadari kawasan mana yang termasuk basis dan non basis pada wilayahnya.

Perencanaan dan pembangunan pada daerah tentunya mengalami perbedaan satu dengan lainnya hal ini di lihat dari potensi sektor ekonomi yang dimiliki daerah itu karena sektor tersebut yang mempengaruhi (Siwu, 2019). Perbedaan tersebut mendorong daerah untuk melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatifnya. Spesialisasi ini mendorong perdagangan antar daerah yang berdampak pada perkembangan ekonomi daerah. Indikator lain untuk suatu daerah dikatakan berkembang dengan melihat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk ditekankan, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat di katakan pembangunan ekonomi berhasil. Bahkan jika peningkatannya kecil ataupun besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan yang diperlihatkan oleh PDRB suatu daerah adalah suatu ukuran yang menandai bahwa terjadi kenaikan dari pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi juga dilihat dari produksi barang/jasa yang dihasilkan, serta kenaikan terjadi pada tahun tahun tertentu (Indrajaya, 2016). Data dari PDRB dapat diketahui bagaimana kondisi atau keadaan ekonomi suatu daerah pada periode tahun tertentu, dari data itu juga dapat dilakukan evaluasi hasil atau proses dari pembangunan di daerah atau wilayah yang lebih luas (nasional). Data PDB dalam taraf nasional dan PDRB dalam taraf regional (provinsi) dapat

mengetahui dan menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah pada periode tertentu (Assidikiyahi, 2021).

**Gambar 1.1. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota  
(persen)**



Sumber : BPS Jatim, 2020

Dari grafik tersebut dapat di lihat pada tahun 2018 hingga 2019 laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah kabupaten Blitar, kabupaten Tulungagung, serta Jawa Timur sendiri mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, hal itu karena Indonesia belum terjadi pandemi covid. Pada tahun 2020 Indonesia terjadi pandemi covid yang mengakibatkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah kabupaten atau kota di Jawa Timur mengalami penurunan, itu terjadi di kabupaten Blitar dan kabupaten Tulungagung.

Penurunan yang terjadi pada laju pertumbuhan kabupaten Blitar di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu menurunnya harga telur ayam akibat pandemi

covid dikeluhkan oleh peternak telur ayam dan ayam potong di blitar, terjadi penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari berakibat pada usaha mikro, kecil dan menengah di daerah tersebut. Usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten blitar juga terjadi kesulitan tenaga kerja karena masyarakat blitar saat pandemi lebih memilih untuk dirumah saja. UMKM juga mengalami penurunan dari segi permintaan sehingga banyak pekerja yang diberhentikan karena tidak mampu membayar upah para pekerja.

Industri atau sektor pariwisata ialah salah satu yang paling terasa terkena dampak dari covid-19 tersebut. Kegiatan pariwisata yang terdapat pada kabupaten Blitar sempat mengalami pemberhentian dalam beroperasi atau tutup sementara pada bulan Maret 2020 dan baru dibuka kembali pada bulan Agustus 2020. Penutupan pariwisata tersebut berlangsung hingga diperoleh izin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Blitar (Radite, 2020). Usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu yang terkena dampak adanya penutupan pada kawasan pariwisata di kabupaten Blitar. Terutama pada UMKM makanan dimana tempat wisata menjadi ladang untuk menjual atau memasarkan hasil karyanya. Jika tempat wisata tutup maka sangat berdampak mengalami kerugian hingga dapat mengakibatkan gulung tikar.

Penurunan yang terjadi pada laju pertumbuhan kabupaten Tulungagung disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sirkulasi perdagangan di pasar Tulungagung yang mengalami penurunan secara drastis yang diakibatkan terjadinya wabah covid-19. Ada 40 pasar tradisional yang tersebar di 19 jalan, yang berarti ratusan pedagang tradisional harus berjuang untuk menjual dagangannya karena penurunan jumlah pembeli di pasar tradisional. Guncangan

yang dialami para pedagang ini bukan hanya penurunan kunjungan pasar, tetapi juga model bisnis tradisional. Tidak banyak pedagang pasar yang mampu beralih dari sistem offline ke sistem online dan akhirnya hanya mengandalkan pasar fisik yang harus bertemu pembeli (Dede Nurohman, 2021). Memang, ujian ekonomi ini sudah terasa di kawasan Tulungagung, terbukti dari kegiatan pemerintah kabupaten yang berupaya menasehati dan membersihkan tempat-tempat yang biasa digunakan warga untuk berkumpul, seperti warung kopi dan angkringan. Sterilisasi ini menambah ketidakpastian para pelaku usaha di Tulungagung.

Sektor transportasi Tulungagung juga terkena dampak covid-19. Angka lalu lintas nasional menunjukkan bahwa penggunaan lalu lintas di Indonesia telah turun sekitar 73 persen (Dede Nurohman, 2021). Hal itu juga berdampak pada Tulungagung, memaksa dua perusahaan mobil utama di Tulungagung untuk berhenti beroperasi, yaitu PO Harapan Jaya dan PO Bagong. Matinya dua perusahaan angkutan tersebut mengakibatkan akses Tulungagung ke Surabaya dan Malang terhenti. Selain perusahaan bus, angkutan kereta api juga harus dihentikan karena PT KAI telah menghentikan operasi kereta api. Oleh karena itu, penurunan penggunaan transportasi sebesar 73% juga termasuk dampak yang dialami masyarakat Tulungagung dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kelumpuhan sektor transportasi berdampak sangat serius terhadap pariwisata yang merupakan salah satu andalan pendapatan daerah.

Hal menarik dari kedua kabupaten tersebut yaitu dengan jumlah penduduk di kabupaten blitar pada tahun 2020 sebanyak 1,164 juta dan kabupaten tulungagung sebanyak 1,043 juta dapat menyumbangkan nilai produk domestik

regional bruto ke provinsi cukup besar dan luas wilayah yang tidak terlalu besar dari pada kabupaten atau kota di Jawa Timur lainnya. Banyak potensi ekonomi yang dapat di kembangkan oleh pemerintah daerah pada kedua kabupaten tersebut.

Luas daerah yang dimiliki kabupaten Blitar adalah sebesar 1.588,79 km<sup>2</sup> dengan perkiraan besaran dataran tinggi sekitar 38,02% bagian dari keseluruhan wilayah dengan kisaran ketinggian 300-420 dari permukaan laut. Hal itu menyebabkan kabupaten blitar memiliki berbagai macam hasil pertanian ialah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar (BPS, 2021). Menjadikan sektor pertanian ialah salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi di Kabupaten Blitar yang pastinya jika sektor tersebut melemah akan mempengaruhi sektor lainnya. Pemasok produksi telur ayam dalam jumlah yang besar salah satunya yaitu Kabupaten Blitar untuk memenuhi permintaan pasar. Daerah ini dapat memasok 70% telur untuk Jawa Timur dan berkontribusi 30% dari pasokan telur di nasional. Selama 3 tahun terlihat peningkatan pendapat disektor tersebut. Meningkatnya ekonomi penduduk, kesejahteraan masyarakat dan proses dalam pembangunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelolah kekayaan SDA itu sendiri karena akan menjadi modalnya.

Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055,65 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia dan salah satu pusat industri marmer di Indonesia, hingga menembus pasar Internasional, tetapi sayangnya saat ini marmer berkualitas terbaik sudah habis. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah untuk mencari sektor ekonomi untuk pengganti sektor pertambang dan penggalian (BPS, 2021). Sektor industri

pengolaan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar pada produk domestik regional bruto guna pendorong perekonomian di kabupaten Tulungagung yang tentunya jika sektor tersebut melemah akan mempengaruhi sektor lainnya. Contoh industri kecil dan menengah penghasil alat perkakas rumah tangga, penghasil batik serta bordir, industri peralatan tentara, penghasil gula merah mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tulungagung.

Selain faktor fisik dan sumber daya yang menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, masih ada permasalahan lain yang berkaitan dengan potensi ekonomi itu sendiri. Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung memiliki sektor-sektor yang memiliki potensi pengembangan, namun belum diketahui sektor basis apa yang berada di masing-masing kabupaten tersebut yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini berguna untuk mengetahui potensi ekonomi Kabupaten Tulungagung dan Blitar. Masalah berikutnya adalah, dari pertumbuhan ekonomi yang ada, tidak jelas sektor ekonomi mana di kawasan yang memiliki potensi daya saing dan spesialisasi. Hal ini penting karena potensi keuntungan yang tidak diketahui sulit untuk dieksploitasi. Jika diketahui sektor-sektor mana yang memiliki potensi, maka pemerintah daerah dapat mengambil sikap dan kebijakan untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut secara lebih tepat, sehingga mendorong pengembangan wilayah Blitar dan Tulungagung.

Peningkatan potensi dan karakteristik daerah dapat berhasil jika sektor-sektor ekonomi dapat dioptimalkan, terutama yang memiliki potensi untuk menjadi unggulan. Perbandingan dalam prioritas utama pembangunan dapat



dilihat dari sektor perekonomian yang memiliki potensi menjadi unggulan. Dari sektor unggulan ini mendapatkan potensi pembangunan yang lebih tinggi dari pada sektor lainnya (Erika, 2013).

Prioritas dari kebijakan yang harus dilakukan yaitu terhadap sektor potensial dimana sektor itu memberikan besaran kontribusi yang cukup besar hal tersebut berfungsi untuk Pengembangan potensi ekonomi daerah kedepannya (Ayu Monica, 2017). Sebab sektor-sektor tersebut yang dapat membumbung ekonomi daerah tumbuh dengan cepat dan di sisi lain jika sektor itu menurun berdampak mempengaruhi sektor lainnya dan sebaliknya, jika sektor potensi meningkat maka terjadi peningkatan pada sektor lainnya. Harapan pemerintah daerah dari sektor unggulan berhasil merangsang sektor-sektor lain untuk berkembang dan memuncakkan perekonomian wilayah tersebut.

Oleh sebab itu dengan masih kurangnya analisis yang terkait dengan potensi ekonomi wilayah dan masih adanya sektor-sektor potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, peneliti memutuskan untuk menggunakan hasil penelitian ini untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang bisa menjadi sektor basis di wilayah Blitar dan Tulungagung, dan potensi apa saja yang ada di masing-masing wilayah, sehingga dapat diketahuinya hal-hal yang diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pembangunan daerah untuk tercapai pengembangan wilayah yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Potensi Sektor Ekonomi Melalui Pendekatan Location Quotient, Shift Share, Tipologi Klassen Di Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Tulungagung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

- 1) Sektor apa sajakah yang merupakan sektor basis dan non basis di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung?
- 2) Apa saja sektor potensial yang ada di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung?
- 3) Sektor apa sajakah di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung yang cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
- 4) Bagaimana pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan non basis di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis sektor potensial yang ada di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis sektor di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung yang cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisis potensi sektor ekonomi Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung melalui metode Location Quotien, Shift Share, dan Tipologi Klassen dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung dengan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dan menganalisis pengaruh sektor basis dan non basis terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan metode regresi linier berganda dengan data sektor basis dan non basis Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar tahun 2013 sampai 2020 serta data pertumbuhan ekonomi kedua kabupaten tersebut pada tahun 2013 sampai 2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian empiris yang dapat memperkaya khasanah keilmuan.